BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini peneliti akan menganalisa dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai "Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja".

Adapun data yang terkumpul dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada peserta (Unit Kerja dari perwakilan masing-masing Dinas yang berada di Kota Bandung) yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi berupa pelatihan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang bertempat di gedung Serbaguna Pemerintah Kota Bandung Lantai 3 JL.Wastukencana No.2 Bandung. Penyebaran angket dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 mei 2011**.** Angket ini disebarkan kepada 50 orang responden melalui *Total Sampling,* sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

Agar pembahasan yang dilakukan lebih sistematis dan terarah maka analisis penelitian ini terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1. Deskriptif Identitas Responden.
2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian.
3. Analisis Uji Validitas dan Realibilitas.
4. Korelasi Antara Variabel X Dengan Variabel Y.
5. Pembahasan Hasil Penelitian.

4.1 Deskriptif Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini akan diuraikan berdasarkan: Jenis kelamin, Usia, dan Pendidikan responden. Adapun identitas responden tersebut akan dijabarkan melalui tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.1.1 sampai dengan 4.1.3 berikut :

Tabel 4.1.1

Jenis Kelamin Responden

n=50

No	Jenis Kelamin	F	%
1	Laki-laki	34	68.0
2	Perempuan	16	32.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.1.1 di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, responden terbesar adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang dengan persentase sebesar 68.0% sedangkan responden terkecil adalah responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 Orang dengan persentase 32.0%.

Hal ini berarti bahwa peserta yang diundang lebih banyak laki-laki. Hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaannya yang bergerak dalam bidang Informasi publik. Dimana membutuhkan mobilitas yang tinggi dalam mencari informasi dan memberikan tanggapan kepada publik secara cepat.

Tabel 4.1.2

Usia Responden

n=50

No	Usia	F	%
1	21-30 tahun	7	14.0
2	31-40 tahun	8	16.0
3	41-50 tahun	22	44.0
4	>50 tahun	13	26.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.1.2 di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, responden terbesar rata-rata berusia 41-50 Tahun berjumlah 22 Orang dengan persentase 44.0%, selanjutnya untuk usia >50 Tahun sebanyak 13 Orang dengan persentase 26.0%, untuk usia 31-40 Tahun sebanyak 8 Orang dengan persentase 16.0%, dan untuk responden terkecil rata-rata berusia 21-30 Tahun berjumlah 7 Orang dengan persentase 14.0%.

Hal ini berarti bahwa unit kerja dari perwakilan masing-masing dinas yang diundang kebanyakan usianya matang dan sudah berpengalaman. Sehingga nantinya bisa mengajarkan kembali kepada anggota-anggota lainnya bagaimana cara menghadapi publik dalam memberikan jawaban informasi mana yang bisa disampaikan dan mana yang tidak boleh untuk disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 4.1.3

Pendidikan Responden

n=50

No	Pendidikan Terakhir	F	%
1	Lulusan SMA/Sederajat	2	4.0
2	S1	30	60.0
3	S2	15	30.0
4	S3	3	6.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.1.3 di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, pendidikan responden terbanyak yaitu S1 berjumlah 30 Orang dengan persentase 60.0%, selanjutnya untuk pendidikan S2 sebanyak 15 Orang dengan persentase 30.0%, untuk S3 sebanyak 3 Orang dengan persentase 6.0%, dan untuk pendidikan responden yang terkecil yaitu lulusan SMA/Sederajat berjumlah 2 Orang dengan persentase 4.0%.

Hal ini berarti bahwa unit kerja yang hadir lebih banyak sarjana. Hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaannya yang membutuhkan pengetahuan yang luas dan ilmu yang didapat selama mengenyam pendidikan. Karena disini dibutuhkan unit kerja yang pandai dalam mengatasi pengaduan publik.

4.2 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

4.2.1 Kredibilitas Komunikator Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.

Pada tabel 4.2.1.1 sampai tabel 4.2.1.4 peneliti mengemukakan tentang pernyataan mengenai Kredibilitas Komunikator dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta dapat mengubah sikap komunikan. Artinya kredibilitas komunikator, mendukung pada keefektivitasan komunikasi.

Makadari itu pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai kredibilitas Komunikator adalah keahlian sumber dalam menguasai materi, mampu menjawab pertanyaan, kepercayaan sumber dalam gaya pembicaranya, dan penampilan pembicara.

Tabel 4.2.1.1

Pembicara Menguasai Materi Informasi Yang Disampaikan Kepada Peserta

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	3	6.0
4	Setuju	44	88.0
5	Sangat setuju	3	6.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.1.1 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Pembicara menguasai materi informasi yang disampaikan kepada peserta". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 44 responden dengan persentase 88,0% menyatakan setuju bahwa Pembicara dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menguasai materi, sementara 3 responden dengan persentase 6,0% menyatakan sangat setuju bahwa Pembicara dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menguasai materi, dan 3 responden dengan persentase 6,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Pembicara dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menguasai materi. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar responden setuju pembicara menguasai materi informasi yang disampaikan kepada peserta.

Tabel 4.2.1.2

Pembicara Mampu Menjawab Setiap Pertanyaan Dari Peserta Pelatihan Mengenai Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	0	0.0
4	Setuju	49	98.0
5	Sangat setuju	1	2.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.1.2 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Pembicara mampu menjawab setiap pertanyaan dari peserta pada saat pelatihan mengenai Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik". dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 49 responden dengan persentase 98,0% menyatakan setuju bahwa Pembicara mampu menjawab setiap pernyataan dari peserta pada saat pelatihan, dan 1 responden dengan persentase 2,0% menyatakan sangat setuju bahwa Pembicara mampu menjawab setiap pernyataan dari peserta pada saat pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Pembicara mampu menjawab setiap pernyataan dari peserta

pada saat pelatihan mengenai Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.2.1.3

Gaya Pembicara Pada Saat Menyampaikan Materi Menarik Perhatian

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	1	2.0
3	Ragu-ragu	0	0.0
4	Setuju	45	90.0
5	Sangat setuju	4	8.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.1.3 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Gaya pembicara pada saat menyampaikan materi menarik perhatian". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 45 responden dengan persentase 90,0% menyatakan setuju bahwa gaya pembicara pada saat menyampaikan materi menarik perhatian, sementara 4 responden dengan persentase 8,0% menyatakan sangat setuju bahwa gaya pembicara pada saat menyampaikan materi menarik perhatian, dan 1 responden dengan persentase 2,0% menyatakan tidak setuju bahwa gaya pembicara pada saat menyampaikan materi menarik perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Gaya

pembicara pada saat menyampaikan materi menarik perhatian Unit Kerja (Peserta) Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.2.1.4

Penampilan Pembicara Pada Saat Menyampaikan Materi Dapat Mempengaruhi Perhatian Peserta

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	1	2.0
3	Ragu-ragu	4	8.0
4	Setuju	45	90.0
5	Sangat setuju	0	0.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.1.4 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Penampilan pembicara pada saat menyampaikan materi dapat mempengaruhi perhatian peserta". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 45 responden dengan persentase 90,0% menyatakan setuju bahwa Penampilan pembicara pada saat menyampaikan materi dapat mempengaruhi perhatian peserta, sementara 4 responden dengan persentase 8,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Penampilan pembicara pada saat menyampaikan materi dapat mempengaruhi perhatian peserta, dan 1 responden

dengan persentase 2,0% menyatakan tidak setuju bahwa Penampilan pembicara pada saat menyampaikan materi dapat mempengaruhi perhatian peserta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Penampilan pembicara pada saat menyampaikan materi dapat mempengaruhi perhatian peserta Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

4.2.2 Isi Pesan Yang Disampaikan dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja

Pada tabel 4.2.2.1 sampai tabel 4.2.2.3 peneliti mengemukakan tentang pernyataan mengenai Isi Pesan dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Diperlukannya isi pesan yang dikemas semenarik mungkin agar unit kerja (peserta) tidak jenuh dan isi pesan tersebut dibuat mudah dicerna agar unit kerja (peserta) dapat memahami isi pesannya sehingga unit kerja (peserta) merasa senang dan menilai dari apa yang telah diberikan oleh komunikator. Selain materi yang bagus maka ditambah dengan gaya menyampaikan pesannya kepada unit kerja (peserta) yang baik maka akan adanya ketertarikan tersendiri bagi unit kerja (peserta) untuk memperhatikan.

Makadari itu pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai Isi Pesan adalah Gaya pesan yang disampaikan, Materi Pesan yang disampaikan, dan Daya Tarik isi beritanya.

Tabel 4.2.2.1

Gaya Pesan Yang Disampaikan Oleh Pembicara Menarik

n=50

No	Pilihan Jawaban	f	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	2	4.0
4	Setuju	46	92.0
5	Sangat setuju	2	4.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.2.1 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Gaya pesan yang disampaikan oleh Pembicara menarik". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 46 responden dengan persentase 92,0% menyatakan setuju bahwa Gaya pesan yang disampaikan oleh Pembicara menarik, sementara 2 responden dengan persentase 4,0% menyatakan sangat setuju bahwa Gaya pesan yang disampaikan oleh Pembicara menarik, dan 2 responden dengan persentase 4,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Gaya pesan yang disampaikan oleh Pembicara menarik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Gaya pesan yang disampaikan oleh Pembicara menarik**.**

Tabel 4.2.2.2

Materi Pesan Yang Disampaikan Oleh Pembicara

Dapat Dipahami Oleh Peserta Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	f	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	1	2.0
4	Setuju	45	90.0
5	Sangat setuju	4	8.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.2.2 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Materi pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami oleh peserta pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 45 Responden dengan persentase 90,0% menyatakan setuju bahwa materi pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami oleh peserta pelatihan, sementara 4 Responden dengan persentase 8,0% menyatakan sangat setuju bahwa materi pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami oleh peserta pelatihan, dan 1 Responden dengan persentase 2,0% menyatakan ragu-ragu bahwa materi pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami oleh peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Materi pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami oleh peserta pelatihan.

Tabel 4.2.2.3

Informasi Yang Disampaikan Pembicara Dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki Daya Tarik Isi Beritanya

n=50

No	Pilihan Jawaban	f	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	3	6.0
4	Setuju	47	94.0
5	Sangat setuju	0	0.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.2.3 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Informasi yang disampaikan pembicara dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki Daya Tarik Isi Beritanya". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 47 responden dengan persentase 94,0% menyatakan setuju bahwa Informasi yang disampaikan pembicara dalam sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik memiliki daya tarik isi beritanya dan 3 responden dengan persentase 6,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Informasi yang disampaikan pembicara dalam sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik memiliki daya tarik isi beritanya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Informasi yang disampaikan pembicara dalam sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik memiliki daya tarik isi beritanya.

4.2.3 Media Yang Digunakan dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja

Pada tabel 4.2.3.1 sampai tabel 4.2.3.2 peneliti mengemukakan tentang pernyataan mengenai Media yang digunakan dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Media merupakan saluran yang digunakan oleh komunikator atau sumber dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan atau pemakai. Makadari itu pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai Media adalah Alat (*Infocus*) yang digunakan dan Modul yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pada saat Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tabel 4.2.3.1

Alat/Media Yang Digunakan Dalam Sosialisasi UU KIP Sangat Mendukung Jalannya Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	4	8.0
4	Setuju	36	72.0
5	Sangat setuju	10	20.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.3.1 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Alat/media yang digunakan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung sangat mendukung jalannya pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 36 responden dengan persentase 72,0% menyatakan setuju bahwa Alat/media yang digunakan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung sangat mendukung jalannya pelatihan, sementara 10 responden dengan persentase 20,0% menyatakan sangat setuju bahwa Alat/media yang digunakan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung sangat mendukung jalannya pelatihan, dan 4 responden dengan persentase

8,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Alat/media yang digunakan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung sangat mendukung jalannya pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Alat/media yang digunakan dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat mendukung jalannya pelatihan.

Tabel 4.2.3.2

Modul Yang Diberikan Dalam Sosialisasi UU KIP Dapat Membantu Pemahaman Materi Bagi Peserta Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	1	2.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	0	0.0
4	Setuju	44	88.0
5	Sangat setuju	5	10.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.3.2 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Modul yang diberikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat membantu pemahaman materi bagi peserta (Unit Kerja) pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 44 responden

dengan persentase 88,0% menyatakan setuju bahwa modul yang diberikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat membantu pemahaman materi bagi peserta pelatihan, sementara 5 responden dengan persentase 10,0% menyatakan sangat setuju bahwa modul yang diberikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat membantu pemahaman materi bagi peserta pelatihan, dan 1 responden dengan persentase 2,0% menyatakan sangat tidak setuju modul yang diberikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat membantu pemahaman materi bagi peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Modul yang diberikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat membantu pemahaman materi bagi peserta pelatihan

4.2.4 Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung Terhadap Aspek Kognitif Unit Kerja

Pada tabel 4.2.4.1 sampai tabel 4.2.4.3 peneliti mengemukakan tentang pernyataan mengenai Aspek Kognitif Unit Kerjanya yang hadir pada sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun pengertian aspek kognitif (komponen perseptual), adalah Komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.

Makadari itu pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai Aspek Kognitif adalah Pengetahuan, Kemampuan, dan Pemahaman Unit Kerja (peserta) Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.2.4.1

Adanya Sosialisasi UU KIP Dapat Menambah Pengetahuan Peserta Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	0	0.0
4	Setuju	48	96.0
5	Sangat setuju	2	4.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.4.1 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Adanya Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat menambah pengetahuan peserta pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 48 responden dengan persentase 96,0% menyatakan setuju bahwa adanya Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat menambah pengetahuan peserta pelatihan dan 2 responden dengan persentase 4,0% menyatakan sangat setuju bahwa adanya Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat menambah pengetahuan peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan Adanya Pelatihan

Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat menambah pengetahuan peserta pelatihan.

Tabel 4.2.4.2

Materi Yang Disampaikan Oleh Pembicara Dalam Kegiatan Sosialisasi UU KIP Mudah Untuk Dipahami Oleh Peserta Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	1	2.0
3	Ragu-ragu	2	4.0
4	Setuju	44	88.0
5	Sangat setuju	3	6.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.4.2 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Materi yang disampaikan oleh pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mudah Untuk Dipahami oleh peserta pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 44 responden dengan persentase 88,0% menyatakan setuju bahwa materi yang disampaikan oleh pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mudah Untuk Dipahami oleh peserta pelatihan, sementara 3 responden dengan persentase 6,0% menyatakan sangat setuju bahwa materi yang disampaikan oleh

pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mudah Untuk Dipahami oleh peserta pelatihan, 2 responden dengan persentase 4,0% menyatakan ragu-ragu bahwa materi yang disampaikan oleh pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mudah Untuk Dipahami oleh peserta pelatihan, dan 1 responden dengan persentase (2,0%) menyatakan tidak setuju bahwa materi yang disampaikan oleh pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mudah Untuk Dipahami oleh peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Materi yang disampaikan oleh pembicara dalam kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mudah Untuk Dipahami oleh peserta pelatihan.

Tabel 4.2.4.3

Isi Materi Yang Disampaikan Dalam Kegiatan Sosialisasi UU KIP Dapat Dipahami Oleh Peserta Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	3	6.0
4	Setuju	46	92.0
5	Sangat setuju	1	2.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.4.3 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipahami oleh peserta pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 46 Responden dengan persentase 92,0% menyatakan setuju bahwa Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipahami oleh peserta pelatihan, sementara 3 Responden dengan persentase 6,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipahami oleh peserta pelatihan, dan 1 Responden dengan persentase 2,0% menyatakan sangat setuju bahwa Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipahami oleh peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipahami oleh peserta pelatihan.

4.2.5 Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung Terhadap Aspek Afektif Unit Kerja

Pada tabel 4.2.5.1 sampai tabel 4.2.5.2 peneliti mengemukakan tentang pernyataan mengenai Aspek Afektif Unit Kerjanya yang hadir pada pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Adapun pengertian aspek afektif (komponen emosional), adalah komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

Makadari itu pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai Aspek Afektif adalah rasa senang dan penilaian unit kerja terhadap Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 4.2.5.1

Merasa Setuju Dengan Diadakannya Kegiatan Sosialisasi UU KIP

n=50

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	0	0.0
4	Setuju	45	90.0
5	Sangat setuju	5	10.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.5.1 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Merasa setuju dengan diadakannya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik". dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 45 Responden dengan persentase 90,0% menyatakan setuju bahwa Peserta merasa setuju dengan diadakannya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan 5 Responden dengan persentase 10,0% menyatakan sangat setuju bahwa Peserta merasa setuju dengan diadakannya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Merasa setuju dengan diadakannya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 4.2.5.2

Pandangan Mengenai Kegiatan Sosialisasi UU KIP Sangat Bermanfaat Bagi Peserta Pelatihan

n=50

No	Pilihan Jawaban	f	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	0	0.0
4	Setuju	50	100.0
5	Sangat setuju	0	0.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.5.2 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Pandangan mengenai kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat bermanfaat bagi peserta pelatihan". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 50 responden dengan persentase 100,0% menyatakan setuju bahwa kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat bermanfaat bagi peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden setuju mengenai kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat bermanfaat bagi peserta pelatihan.

4.2.6 Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung Terhadap Aspek Konatif Unit Kerja

Pada tabel 4.2.6.1 sampai tabel 4.2.6.2 peneliti mengemukakan tentang pernyataan mengenai Aspek Konatif Unit Kerjanya yang hadir pada pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Adapun pengertian aspek konatif (komponen perilaku, atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Makadari itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai aspek konatif adalah kecenderungan perilaku dan kesediaan Unit Kerja Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.2.6.1

Adanya Kegiatan Sosialisasi UU KIP Dapat Merubah Perilaku Peserta Pelatihan Ke Arah Yang Lebih Positif

n=50

No	Pilihan Jawaban	f	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	3	6.0
4	Setuju	46	92.0
5	Sangat setuju	1	2.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari Tabel 4.2.6.1 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Adanya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat merubah perilaku peserta pelatihan ke arah yang lebih positif". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 46 responden dengan persentase 92,0% menyatakan setuju bahwa Adanya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat merubah perilaku peserta pelatihan ke arah yang lebih positif, sementara 3 responden dengan persentase 6,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Adanya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat merubah perilaku peserta pelatihan ke arah yang lebih positif, dan 1 responden dengan persentase 2,0% menyatakan sangat setuju bahwa Adanya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat

merubah perilaku peserta pelatihan ke arah yang lebih positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Adanya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat merubah perilaku peserta pelatihan ke arah yang lebih positif.

Tabel 4.2.6.2

Peserta Pelatihan Bersedia Untuk Mengaplikasikan Informasi Yang Telah Diberikan Dalam Kegiatan Sosialisasi UU KIP

n=50

No	Pilihan Jawaban	f	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Ragu-ragu	1	2.0
4	Setuju	45	90.0
5	Sangat setuju	4	8.0
Jumlah		50	100,0

Sumber : Hasil Angket Penelitian, Juni 2011

Dari tabel 4.2.6.2 di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai pernyataan "Peserta pelatihan bersedia untuk mengaplikasikan informasi yang telah diberikan dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik". Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 45 responden dengan persentase 90,0% menyatakan setuju bahwa Peserta pelatihan bersedia untuk mengaplikasikan informasi yang telah diberikan dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sementara 4 responden dengan persentase 8,0% menyatakan

sangat setuju bahwa Peserta pelatihan bersedia untuk mengaplikasikan informasi yang telah diberikan dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan 1 responden dengan persentase 2,0% menyatakan ragu-ragu bahwa Peserta pelatihan bersedia untuk mengaplikasikan informasi yang telah diberikan dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju Peserta pelatihan bersedia untuk mengaplikasikan informasi yang telah diberikan dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Husen Umar mengatakan "Validitas adalah dimaksudkan untuk menyamakan sejauhmana data yang ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang ingin diukur" (Umar, 2002:97). Maka sebelum penelitian menyebarkan angket kepada responden berdasarkan ketentuan sebelum angket atau kuesioner disebarkan, maka terlebih dahulu penelitian melakukan uji validitas dan reliabilitas.

Data dapat dikatakan valid apabila data tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reabilitas digunakan untuk menunjukan adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, dengan demikian reabilitas berfokus pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan uji

validitas dan reabilitas data dengan menggunakan *Microsoft Excel* 2007 dan SPSS versi 13.

Adapun pengujian validitas dan reabilitas data menelitian yang diperoleh melalui penyebaran angket yang telah dilakukan akan dijelaskan pada poin-poin dibawah ini.

4.3.1 Uji Validitas

Sebelum menyebarkan seluruh angket penelitian atau kuesioner kepada responden yaitu Unit Kerja dari perwakilan masing-masing Dinas yang berada di Kota Bandung, terlebih dahulu peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 19 pernyataan (dari pernyataan no 4 sampai dengan pernyataan no 19) yaitu mengenai data penelitian. Uji validitas dan reliabilitas ini peneliti lakukan pada 50 responden.

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap item pernyataan dengan jumlah total jawaban responden atas seluruh pernyataan. Koefisien korelasi tiap item akan dibandingkan dengan 0,3 (df). Jika nilai korelasi suatu item/pernyataan lebih kecil atau sama dengan 0.3, maka pernyataan tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian yang dilakukan. Hanya item yang memiliki nilai korelasi lebih tinggi dari 0.3 diikut sertakan dalam pengujian (Sugiyono, 2003:124).

Untuk menguji validitas dan reabilitas peneliti menggunakan program SPSS 13. Hasil dari pengujiannya dapat secara langsung dilihat pada kolom *Output Correlated Item Total Correlation*, dibawah ini :

Tabel 4.3.1.1

Tabel Nilai Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket

Variabel	Pertanyaan	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Keterangan	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Keterangan
Kredibilitas Sumber	p4	0.899	0.3	Valid	**0.773**	**0.7**	**Reliabel**
	p5	0.425	0.3	Valid			
	p6	0.886	0.3	Valid			
	p7	0.798	0.3	Valid			
Isi Pesan	p8	0.750	0.3	Valid	**0.773**	**0.7**	**Reliabel**
	p9	0.797	0.3	Valid			
	p10	0.447	0.3	Valid			
Media	p11	0.794	0.3	Valid	**0.727**	**0.7**	**Reliabel**
	p12	0.804	0.3	Valid			
Aspek Kognitif	p13	0.307	0.3	Valid	**0.733**	**0.7**	**Reliabel**
	p14	0.904	0.3	Valid			
	p15	0.839	0.3	Valid			
Aspek Afektif	p16	0.903	0.3	Valid	**0.495**	**0.7**	**Cukup Reliabel**
	p17	0.387	0.3	Valid			

Aspek Konatif	p18	0.768	0.3	Valid	**0.653**	**0.7**	**Cukup Reliabel**
	p19	0.817	0.3	Valid			

Sumber : Output SPSS 13

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran *relative* konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan mencari korelasi menggunakan teknik belah dua (*split-half*) dengan membagi item-item pernyataan responden menjadi belahan genap dan belahan ganjil.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji reliabilitas adalah :

1. Item-item yang valid dikumpulkan dan yang tidak valid dibuang.
2. Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan berdasarkan nomor ganjil dan genap.
3. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden yakni skor total untuk belahan ganjil dan skor total belahan genap.

4. Mengkorelasikan skor total belahan ganjil dan belahan genap dengan menggunakan teknik korelasi *product moment pearson*.

5. Selanjutnya adalah mencari angka reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah dua. Angka korelasi yang diperoleh harus lebih rendah daripada angka korelasi yang diperoleh jika keseluruhan

6. Item tidak dibelah.

Perhitungan korelasi antara skor belahan ganjil dengan skor belahan genap diperoleh melalui perhitungan uji realibilitas dengan teknik belah dua (*Split-Half*), yang menggunakan rumus :

$$r.tt = \frac{n\sum XY - (\sum X.\sum Y}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dengan menggunakan tabel pembantu pengujian reliabilitas (lihat lampiran) didapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencari angka r.tt sebagai berikut :

Σ_X = 200

Σ_Y = 797

Σ_X^2 = 806

Σ_Y^2 = 12757

Σ_{XY} = 3204

$(\Sigma_X)^2$ = 40000

$(\Sigma_Y)^2$ = 635209

n = 50

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka perhitungan angka korelasi r.tt adalah :

$$r.tt = \frac{50(3204) - (200)(797)}{\sqrt{50(806) - (200)^2\}\{50(12757) - (797)^2\}}}$$

$$r.tt = \frac{800}{890{,}1124}$$

r.tt = 0,898763 > 0,3 (**Valid**)

Setelah angka korelasi r.tt diperoleh, selanjutnya dicari angka reliabilitas (r.tot) untuk keseluruhan item tanpa dibelah, dengan menggunakan rumus:

$$r.tot = \frac{2(r.tt)}{1 + r.tt}$$

$$r.tot = \frac{2(0{,}898763)}{1 + 0{,}898763}$$

r.tot = 0,94668266 (angka reliabilitas)

Hasilnya, angka korelasi (r.tt) : **0,898763** lebih kecil dari angka reliabilitas (r.tot) : **0,94668266**. (ketentuan : Nilai konsistensi = **r.tt < r.tot**). Nilai konsistensi = **0,898763 < 0,94668266.** Artinya

item-item pernyataan memiliki konsistensi dalam mengukur gejala yang sama (Sugiyono, 2006 : 278).

Selain menggunakan rumus dan ketentuan-ketentuan diatas, uji validitas dan reliabilitas data penelitian dalam penelitian ini, juga di uji dengan menggunakan perhitungan *r-alpha* melalui analisa SPSS versi 13.

Untuk melihat hasil pengujian realibilitas data yang telah dilakukan, didapatkan nilai r untuk reliabilitas (*cronbach's alpha if deleted*), dengan hasil yang didapat secara langsung dilihat pada kolom *output Cronbach Alpha Item*.

Selanjutnya adalah dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

1. Jika r Alpha positif dan > 0,9 maka butir pernyataan tersebut reliabel, atau
2. Jika r Alpha positif dan > r tabel, maka butir pernyataan tersebut juga reliable, atau
3. Jika r Alpha positif dan < r tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak reliabel

Berdasarkan kriteria diatas, maka pada data terlihat bahwa semua r Alpha positif dan > dari 0,9 dengan demikian semua butir pernyataan pada angket penelitian sudah **reliabel.**

4.4 Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y

Dalam pengolahan data mentah disesuaikan dengan *skoring* pada masing-masing alat ukur. Penghitungan statistik digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan pengujian terhadap hipotesis. Terdapat 2 (Dua) variabel dalam penelitian ini (X dan Y) dimana keduanya berskala ordinal. Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, data yang terkumpul melalui *kuisioner* dan telah diberi bobot dengan menggunakan skala kategori dan dihitung skor dari masing-masing responden berdasarkan total jumlah dari total jawaban tersebut akan dilakukan perangkingan berdasarkan jumlah skor tersebut, dan kemudian diolah menjadi uji statistik dengan alat ukur analisis korelasi *Rank Spearman* yang akan menghasilkan koefisien korelasi, untuk mengetahui tingkat hubungan di antara kedua variabel, digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Sumber : Purwanto, 2010 : 230

Keterangan :

r_s : Korelasi *Rank Spearman*

d_i : Selisih dua rank X_i dengan rank Y_i

n : Jumlah sampel

Untuk lebih memudahkan maka peneliti memasukkan rumus di atas kedalam program SPSS 13. Sedangkan untuk menganalisa pengaruh Koefisien Determinasi (KD) atau Variabel X dan Variabel Y digunakan rumus :

$$KD = r^2 \text{ X } 100\%$$

Sumber : Modul Spss 2010

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r = Besarnya Korelasi

Sedangkan pengujian korelasi korelasi *Rank Spearman,* digunakan rumus statistik uji-t yaitu :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Sumber : Ruslan, 2003 :268

Nilai t tabel didapat dari tabel t-*student* dengan derajat bebas (*degree of freedom*) = n-2 dan nilai α yang digunakan 0,01 kemudian pengujian yang dilakukan adalah dua pihak.

Uji signifikansi dilakukan terhadap hipotesis statistik yang telah ditentukan dengan kriteria uji : (dua arah) tolak hipotesis nol pada taraf α jika $| t_{hitung}| > t_{tabel}$ dengan db = n-2 dan α = 0,01.

Sedangkan untuk menghitung tingkat hubungan digunakan kriteria yang dikemukakan oleh Guilford dan dikutip oleh Jalalludin Rakhmat, sebagai berikut :

R_s = < 0,20 : hubungan rendah sekali, lemah sekali.

R_s = 0,20 – 0,40 : hubungan rendah tetapi pasti.

R_s = 0,40 – 0,70 : hubungan yang cukup berarti.

R_s = 0,70 – 0,90 : hubungan yang tinggi, kuat.

R_s = > 0,90 : hubungan sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan. (Rakhmat, 2002 : 29)

Selanjutnya peneliti akan menghitung korelasi antara indikator dan variabel sesuai dengan rumus *Rank Spearman* serta uji hipotesisnya dengan menggunakan cara penghitungan SPSS 13.

4.4.1 Korelasi antara Kredibilitas Komunikator Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara kredibilitas dengan pemahaman menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.1.1

Korelasi Kredibilitas Komunikator dan Pemahaman

Correlations

			kredibilitas (X1)	pemahaman (Y)
Spearman's rho	kredibilitas (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.498**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	pemahaman (Y)	Correlation Coefficient	.498**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara kredibilitas komunikator Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas komunikasi dan informatika Pemerintah Kota bandung dengan Pemahaman Unit Kerja adalah sebesar **0,498**. Artinya hubungan antara Kredibilitas Komunikator Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja terdapat **hubungan yang cukup berarti.**

Hubungan antara kredibilitas komunikator dan pemahaman unit kerja bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kredibilitas Komunikator Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pemahaman Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}498)^2 \times 100\%$

$= 0{,}248004 \times 100\%$

$= 24{,}8\%$

Artinya Kredibilitas komunikator pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas komunikasi dan informatika Pemerintah Kota bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja sebesar 24,8% hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari kredibilitas komunikator pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas komunikasi dan informatika Pemerintah Kota bandung terhadap pemahaman Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika **Kredibilitas Komunikator** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

Ho : Jika **Kredibilitas Komunikator** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}498\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0{,}498^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{3{,}4502452}{0{,}86717703}$$

$$t_{hitung} = 3{,}978092$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara kredibilitas komunikator dengan pemahaman unit kerja, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4.1.2

Hubungan Antara Kredibilitas Komunikator dengan Pemahaman

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X_1 dan Y	0.498	3.978	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

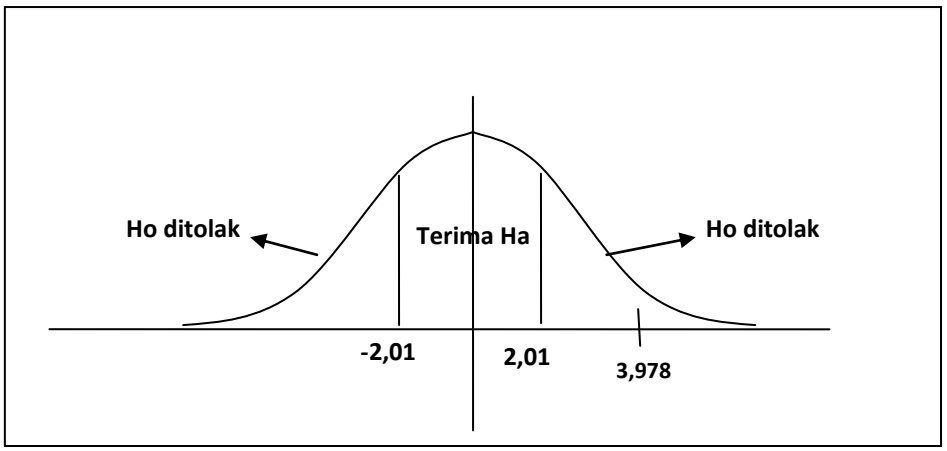
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara kredibilitas komunikator dengan pemahaman unit kerja adalah 0,632. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel sebesar ± 2,01.

1. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.1.1

Kurva Uji t Kredibilitas Komunikator Sosialisasi UU KIP terhadap Pemahaman Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Kredibilitas Komunikator Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

4.4.2 Korelasi antara Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara Isi Pesan dengan Pemahaman menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.2.1

Korelasi Isi Pesan dan Pemahaman

Correlations

			isi pesan (X2)	pemahaman (Y)
Spearman's rho	isi pesan (X2)	Correlation Coefficient	1.000	.732**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	pemahaman (Y)	Correlation Coefficient	.732**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja adalah sebesar **0,732**. Artinya hubungan antara Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja terdapat **hubungan yang tinggi,kuat.**

Hubungan antara Isi Pesan dan Pemahaman bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}732)^2 \times 100\%$

$= 0{,}535824 \times 100\%$

$= 53{,}58\%$

Artinya Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja sebesar 53,58% hal ini menunjukkan pengaruh dari Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap pemahaman Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika **Isi Pesan** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

Ho : Jika **Isi Pesan** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}732\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0{,}732^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{5{,}0714447}{0{,}68130463}$$

$$t_{hitung} = 7{,}4437256$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara isi pesan dengan pemahaman unit kerja, yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.2.2

Hubungan Antara Isi Pesan dengan Pemahaman

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X_2 dan Y	0.732	7.443	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

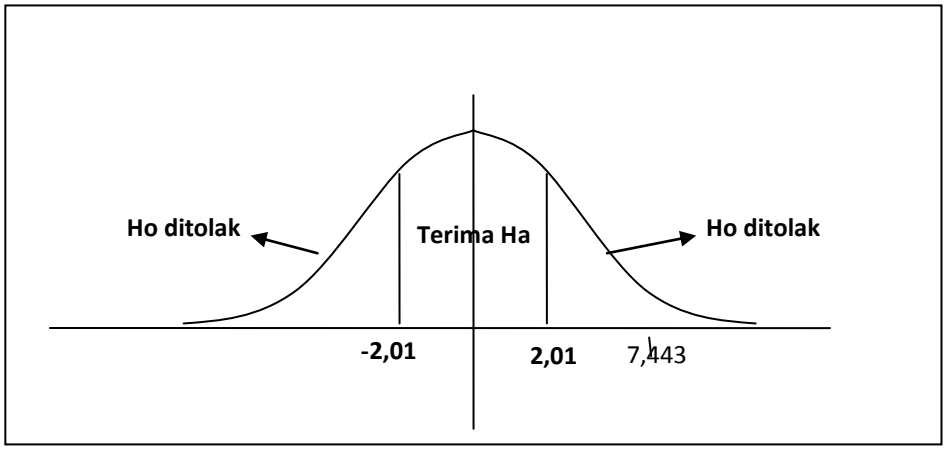
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara isi pesan dengan pemahaman unit kerja adalah 0,732. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel

3. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
4. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.2.1

Kurva Uji t Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi UU KIP Terhadap Pemahaman Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Isi Pesan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

4.4.3 Korelasi antara Media Yang Digunakan Dalam Pelatihan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara Media dengan pemahaman menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.3.1

Korelasi Media dan Pemahaman

Correlations

			media (X3)	pemahaman (Y)
Spearman's rho	media (X3)	Correlation Coefficient	1.000	.538**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	pemahaman (Y)	Correlation Coefficient	.538**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara media yang digunakan dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja adalah sebesar **0,538**. Artinya hubungan antara media yang digunakan dalam pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja terdapat **hubungan yang cukup berarti.**

Hubungan antara media yang digunakan dan pemahaman bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Media Yang Digunakan Dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}538)^2 \times 100\%$

$= 0{,}289444 \times 100\%$

$= 28{,}94\%$

Artinya Media Yang Digunakan Dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja sebesar 28,94% hal ini menunjukkan pengaruh dari Media Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap pemahaman Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika **Media** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

Ho : Jika **Media** Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}538\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0{,}538^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{3{,}7273733}{0{,}84294484}$$

$$t_{hitung} = 4{,}4218472$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara media dengan pemahaman unit kerja, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4.3.2

Hubungan Antara Media dengan Pemahaman

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X3 dan Y	0.538	4.421	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

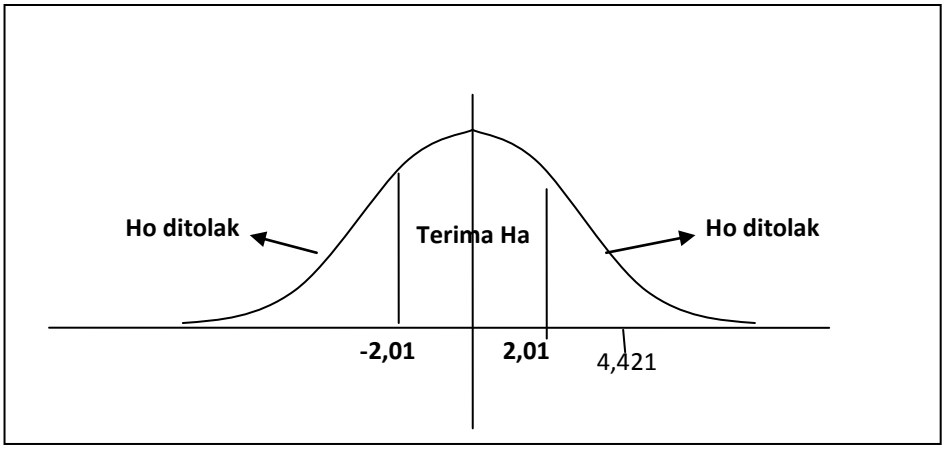
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara Media dengan pemahaman unit kerja adalah 0,538. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel

1. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.3.1

Kurva Uji t Media Pelatihan Sosialisasi UU KIP Terhadap Pemahaman Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Media Yang Digunakan Dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

4.4.4 Korelasi antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Kognitif Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara Efektivitas dengan Aspek Kognitif menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.4.1

Korelasi Efektivitas dan Aspek Kognitif

Correlations

			efektivitas (X)	kognitif (Y1)
Spearman's rho	efektivitas (X)	Correlation Coefficient	1.000	.584**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	kognitif (Y1)	Correlation Coefficient	.584**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Kognitif Unit Kerja adalah sebesar **0,584**. Artinya hubungan antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Aspek Kognitif Unit Kerja terdapat **hubungan yang cukup berarti.**

Hubungan antara Efektivitas dan Aspek Kognitif bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Kognitif Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}584)^2 \times 100\%$

$= 0{,}341056 \times 100\%$

$= 34{,}1056\%$

Artinya Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Kognitif Unit Kerja sebesar 34,1056%. Hal ini menunjukkan pengaruh dari Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Aspek Kognitif Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Aspek Kognitif** Unit Kerja Baik.

Ho : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Aspek Kognitif** Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}584\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0{,}584^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{4{,}0460707}{0{,}81175366}$$

$$t_{hitung} = 4{,}9843578$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara efektivitas Pelatihan sosialisasi dengan aspek kognitif, yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.4.2

Hubungan Antara Efektivitas dengan Aspek Kognitif

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X dan Y_1	0.584	4.984	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

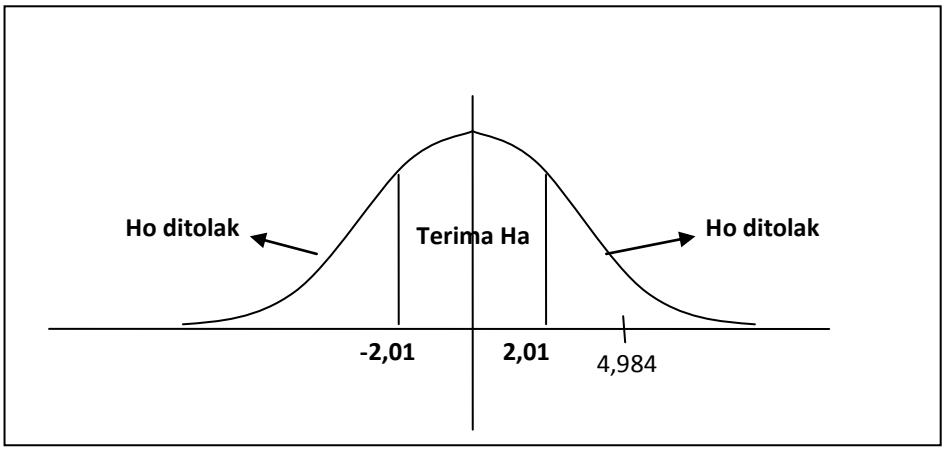
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara Efektivitas dengan aspek kognitif unit kerja adalah 0,584. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel

1. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.4.1

Kurva Uji t Efektivitas Pelatihan Sosialisasi UU KIP Terhadap Aspek Kognitif Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Aspek Kognitif Unit Kerja Baik.

4.4.5 Korelasi antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Afektif Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara Efektivitas dengan Aspek Afektif menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.5.1

Korelasi Efektivitas dan Aspek Afektif

Correlations

			efektivitas (X)	afektif (Y2)
Spearman's rho	efektivitas (X)	Correlation Coefficient	1.000	.451**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	50	50
	afektif (Y2)	Correlation Coefficient	.451**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara Efektivitas pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Afektif Unit Kerja adalah sebesar **0,451**. Artinya hubungan antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah

Kota Bandung terhadap Aspek Afektif Unit Kerja terdapat **hubungan yang cukup berarti.**

Hubungan antara Efektivitas dan Aspek Afektif bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,001 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Afektif Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}451)^2 \times 100\%$

$= 0{,}203401 \times 100\%$

$= 20{,}34\%$

Artinya Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Afektif Unit Kerja sebesar 20,34% hal ini menunjukkan pengaruh dari Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Aspek Afektif Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Aspek Afektif** Unit Kerja Baik.

Ho : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Aspek Afektif** Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}451\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0{,}451^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{3{,}1246196}{0{,}89252395}$$

$$t_{hitung} = 3{,}5008804$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara efektivitas pelatihan sosialisasi dengan aspek afektif, yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.5.2

Hubungan Antara Efektivitas dengan Aspek Afektif

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X dan Y_2	0.538	3.500	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

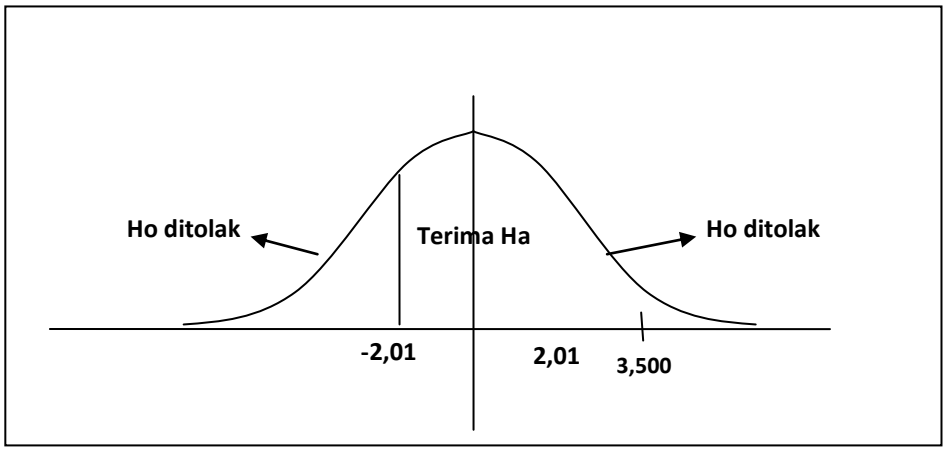
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara efektivitas dengan aspek afektif unit kerja adalah 0,538. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel

1. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.5.1

Kurva Uji t Efektivitas Pelatihan Sosialisasi UU KIP Terhadap Aspek Afektif Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Aspek Afektif Unit Kerja Baik.

4.4.6 Korelasi antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Konatif Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara Efektivitas dengan Aspek Konatif menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.6.1

Korelasi Efektivitas dan Aspek Konatif

Correlations

			efektivitas (X)	konatif (Y3)
Spearman's rho	efektivitas (X)	Correlation Coefficient	1.000	.459**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	50	50
	konatif (Y3)	Correlation Coefficient	.459**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Konatif Unit Kerja adalah sebesar **0,459**. Artinya hubungan antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Aspek Konatif Unit Kerja terdapat **hubungan yang cukup berarti.**

Hubungan antara Efektivitas dan Aspek Konatif bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,001 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Konatif Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}459)^2 \times 100\%$

$= 0{,}210681 \times 100\%$

$= 21{,}0681\%$

Artinya Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Konatif Unit Kerja sebesar 21,0681% hal ini menunjukkan pengaruh dari Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Aspek Konatif Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Aspek Konatif** Unit Kerja Baik.

Ho : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Aspek Konatif** Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}459\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0{,}459^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{3{,}1800453}{0{,}789319}$$

$$t_{hitung} = 4{,}0288468$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara efektivitas pelatihan sosialisasi dengan aspek konatif, yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.6.2

Hubungan Antara Efektivitas dengan Aspek Konatif

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X dan Y_3	0.459	4.028	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

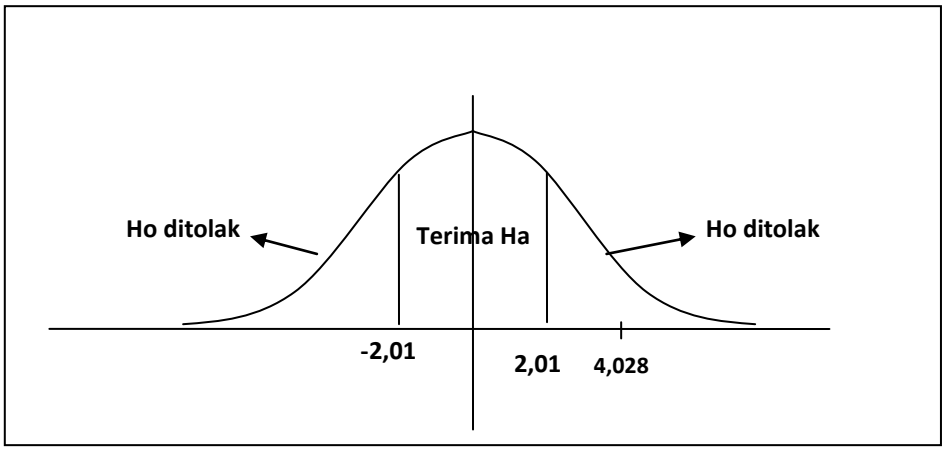
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara Efektivitas dengan aspek konatif unit kerja adalah 0,459. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel

1. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.6.1

Kurva Uji t Efektivitas Pelatihan Sosialisasi UU KIP Terhadap Aspek Konatif Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Aspek Konatif Unit Kerja Baik.

4.4.7 Korelasi antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja

Perhitungan korelasi antara Efektivitas dengan pemahaman menggunakan program SPSS 13. Sehingga hasil dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4.7.1

Korelasi Efektivitas dan Pemahaman

Correlations

			efektivitas (X)	pemahaman (Y)
Spearman's rho	efektivitas (X)	Correlation Coefficient	1.000	.772**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	50	50
	pemahaman (Y)	Correlation Coefficient	.772**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 13

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi *Rank Spearman* antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja adalah sebesar **0,772**. Artinya hubungan antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja terdapat **hubungan yang tinggi, kuat.**

Hubungan antara Efektivitas dan Pemahaman bersifat signifikan, hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 dengan korelasi signifikan 0,01 (2-*tailed*).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja, maka perlu dihitung koefisien determinasinya sebagai berikut :

Pengaruh Koefisien Determinasi

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0{,}772)^2 \times 100\%$

$= 0{,}595984 \times 100\%$

$= 59{,}59\%$

Artinya Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja sebesar 59,59% hal ini menunjukkan pengaruh dari Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit kerja cukup dominan.

Maka Hipotesisnya adalah :

Ha : Jika **Efektivitas** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Pemahaman** Unit Kerja Baik.

Ho : Jika **Efektivitas** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Pemahaman** Unit Kerja Tidak Baik.

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana : r = besarnya korelasi

n = jumlah sampel

Proses Penghitungan :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,772\sqrt{(50-2)}}{\sqrt{(1-0,772^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{5,3485729}{0,63562253}$$

$$t_{hitung} = 8,4147$$

Mencari t tabel

dk = derajat kebebasan

dk = n-2 (dimana n adalah jumlah sampel)

dk = 50-2

dk = 48

Berikut ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara efektivitas pelatihan sosialisasi dengan pemahaman unit kerja, yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.7.2

Hubungan Antara Efektivitas dengan Pemahaman

Variabel	r_s	t hitung	t tabel	Keputusan	Keterangan
X dan Y	0.772	8.414	2.01	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data yang sudah diolah 2011

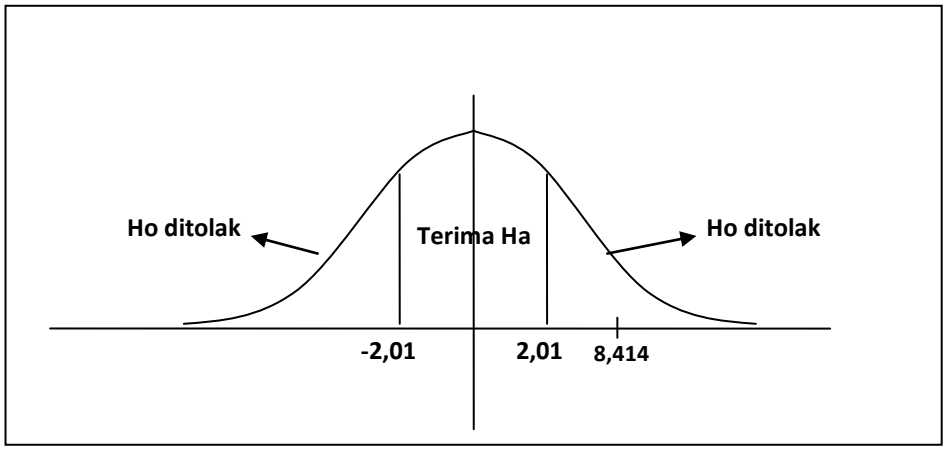
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara efektivitas dengan pemahaman unit kerja adalah 0,772. Hubungan ini termasuk kategori cukup berarti.

Dengan α = 5% dan dk = n-2 = 48 diperoleh nilai t tabel

1. Terima Ho jika t tabel < t hitung , t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel

Gambar 4.4.7.1

Kurva Uji t Efektivitas Pelatihan Sosialisasi UU KIP Terhadap Pemahaman Unit Kerja



Sumber : Data yang sudah diolah 2011

t_{hitung} jatuh didaerah ditolak, artinya Ha diterima, berarti Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.

Sebelum peneliti melakukan pembahasan pada hasil penelitian dan melakukan analisis pada identifikasi masalah maka peneliti membuat tabel ringkasan analisis data korelasi, agar memudahkan pembaca dalam melihat korelasi antara variabel atau sub variabel X dengan sub variabel atau variabel Y, sebagai berikut :

Tabel 4.5.1

Ringkasan Data Analisis Korelasi

No	Variabel / Sub Variabel (X)	Variabel / Sub Variabel (Y)	Besarnya Korelasi	Besarnya Pengaruh	Signifikansi Korelasi	Hipotesis yang Diterima
1	Sub Variabel Kredibilitas Komunikator	Variabel Pemahaman Unit Kerja	0,498	24,8%	Signifikan (0,000 < 0,01)	**Ha:** Ada Pengaruh Kredibilitas Komunikator terhadap Pemahaman Unit Kerja
2	Sub Variabel Isi Pesan	Variabel Pemahaman Unit Kerja	0,732	53,58%	Signifikan (0,001 < 0,01)	**Ha:** Ada Pengaruh Isi Pesan terhadap Pemahaman Unit Kerja
3	Sub Variabel Media	Variabel Pemahaman Unit Kerja	0,538	28,94%	Signifikan (0,000 < 0,01)	**Ha:** Ada Pengaruh Media terhadap

						Pemahaman Unit Kerja
4	Variabel Efektivitas	Sub Variabel Aspek Kognitif Unit Kerja	0,584	34,10%	Signifikan (0,000 < 0,01)	**Ha:** Ada Pengaruh efektivitas terhadap Aspek Kognitif Unit Kerja
5	Variabel Efektivitas	Sub Variabel Aspek Afektif Unit Kerja	0,451	20,34%	Signifikan (0,001 < 0,01)	**Ha:** Ada Pengaruh efektivitas terhadap Aspek Afektif Unit Kerja
6	Variabel Efektivitas	Sub Variabel Aspek Konatif Unit Kerja	0,459	21,06%	Signifikan (0,001 < 0,01)	**Ha:** Ada pengaruh efektivitas terhadap Aspek Konatif Unit Kerja
7	Variabel Efektivitas	Variabel Pemahaman Unit Kerja	0,772	59,59%	Signifikan (0,000 < 0,01)	**Ha:** Ada pengaruh efektivitas terhadap Pemahaman Unit Kerja

Sumber : Analisis Peneliti, Juni 2011

Peneliti mengumpulkan data-data melalui angket, wawancara, studi pustaka dan *Internet Searching*. Penyebaran angket dilakukan pada para peserta (unit kerja) yang menjadi subjek penelitian berdasarkan teknik sampel yang telah ditentukan. Peneliti juga melakukan wawancara terbuka kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung sebagai data sekunder dari penelitian ini.

Penyebaran angket dilakukan selama satu hari pada saat Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diselenggarakan. Agar pembahasan yang dilakukan lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagi hasil penelitian berdasarkan dari hasil analisis korelasi serta hasil survey selama penelitian berlangsung antara Efektivitas dan Pemahaman.

1. Pada pembahasan ini peneliti akan membahas mengenai Efektivitas, Menurut Andre Hardjana untuk mengukur keefektifan suatu komunikasi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :
    1. Sumber pesan (*Source*)

       Merupakan orang yang memberikan pesan kepada pengguna.
    2. Isi Pesan (*content*)

       Isi pesan yang diterima atau tersalur.
    3. Media (*media*)

       Merupakan saluran yang digunakan oleh komunikator atau sumber dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan atau pemakai.
    4. Penerima atau pemakai (*receiver or uses*)

       Merupakan penerima pesan yang dituju atau komunikan yang dituju. (Hardjana : 2000)

    Untuk itu kredibilitas komunikator, isi pesan, dan media dijadikan sebagai indikator dari pengertian Efektivitas yang peneliti angkat. Agar lebih jelas lagi maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai kredibilitas komunikator dari kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kredibilitas ini merupakan indikator dari variabel X yaitu efektivitas dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kredibilitas komunikator Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerjanya. Adapun pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden adalah mengenai keahlian sumber menguasai materi, mampu menjawab pertanyaan, kepercayaan sumber dalam gaya pembicaranya, dan penampilan pembicara.

   Agar tujuan tercapai dari informasi yang disampaikan, maka Komunikator atau sumber harus bisa melakukan komunikasi yang efektif sehingga pesan yang disampaikannya dapat dipahami bagi penerima informasi. Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta dapat mengubah sikap komunikan.

   Berdasarkan hasil korelasi antara kredibilitas komunikator pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja yaitu adanya hubungan

yang cukup berarti. Ini menandakan bahwa informasi yang disampaikan oleh komunikator seperti yang di ungkapkan oleh (Steward L Tubbs dan Sylvia Moss) bahwa komunikasi dianggap efektif paling tidak harus menghasilkan lima hal yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan tindakan.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti melihat bahwa komunikator dari kegiatan pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung kredibel dalam menyampaikan informasi kepada para peserta (Unit Kerja dari perwakilan masing-masing dinas yang berada di kota Bandung) sehingga adanya sebuah pengertian dari para peserta (unit kerja) dalam memahami informasi yang disampaikan karena komunikatornya menguasai materi yang akan disampaikan. Lalu setelah adanya sebuah pengertian maka timbul kesenangan atau rasa senang dari para peserta sehingga adanya perhatian dalam menyimak kegiatan yang sedang berlangsung membuat adanya suatu pengaruh pada sikap peserta ke arah yang lebih positif. Sehingga adanya respon dari peserta untuk bertanya, dan dapat dilihat kecakapan seorang komunikator atau sumber pada saat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta (unit kerja). Sehingga adanya hubungan yang semakin baik antara

komunikator atau sumber dengan peserta (Unit Kerja) dalam kegiatan pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain itu juga kepercayaan sumber dalam gaya berbicara dapat meyakinkan peserta untuk memahami informasi yang disampaikan, dan penampilan pembicara yang dapat meyakinkan peserta bahwa sumbernya kredibel.

Dengan begitu maka Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Tugas Humas yaitu menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi atau pesan baik secara lisan, tertulis atau melalui gambar, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan (Rachmadi, 1992:112).

b. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai Isi Pesan dari kegiatan pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, Isi Pesan ini merupakan indikator dari variabel X yaitu efektivitas dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Isi Pesan pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja. Adapun pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada

responden adalah mengenai Gaya pesan yang disampaikan, Materi Pesan yang disampaikan, dan Daya Tarik isi beritanya.

Diperlukannya isi pesan yang dikemas semenarik mungkin agar peserta pelatihan tidak jenuh dan isi pesan tersebut dibuat mudah dicerna agar para peserta dapat memahami isi pesan. Sehingga peserta merasa senang dan menilai dari apa yang telah diberikan oleh komunikator. Selain materi yang bagus maka ditambah dengan gaya menyampaikan pesannya kepada peserta yang baik maka akan adanya ketertarikan tersendiri bagi peserta atau unit kerja untuk memperhatikan.

Berdasarkan hasil korelasi antara isi pesan pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja yaitu adanya hubungan yang tinggi,kuat. Sehingga Isi Pesan dengan alat ukur yang peneliti angkat dari masing-masing pernyataan seperti Gaya pesan yang disampaikan, Materi Pesan yang disampaikan, dan Daya Tarik isi beritanya adanya hubungan yang tinggi, kuat tandanya ada hubungan yang sangat positif antara Isi Pesan dengan Pemahaman dan berada pada tingkat yang tinggi.

Berarti isi pesan yang disampaikan sangat berpengaruh pada pemahaman peserta (unit kerja). Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti melihat pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung informasi yang disampaikan dikemas semenarik mungkin sehingga isi pesan yang disampaikan dapat mudah diterima dan dipahami oleh peserta (unit kerja). Selain itu juga gaya pesan yang disampaikan dibuat menarik oleh sumber agar para peserta tidak jenuh dan dapat menerima isi pesan yang disampaikan supaya cepat dipahami, materi pesan yang disampaikan jelas, dan adanya daya tarik tersendiri isi beritanya.

Jadi memang benar salah satu pendukung dari efektivitas melalui isi pesan berpengaruh terhadap pemahaman unit kerja (peserta) karena isi pesan jika tidak disampaikan dengan baik oleh komunikan maka isi pesan tersebut tidak akan diterima dengan baik oleh unit kerja (peserta).

c. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai Media yang digunakan dalam kegiatan pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, Media ini merupakan indikator dari variabel X yaitu efektivitas dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Media Yang Digunakan Dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja. Adapun pernyataan-

pernyataan yang diajukan kepada responden adalah mengenai Alat (*Infocus*) yang digunakan dan Modul yang disebarkan.

Media merupakan saluran yang digunakan oleh komunikator atau sumber dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan atau peserta. Agar menunjang penyampaian informasi dalam kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung didorong dengan menggunakan media atau alat seperti *infocus* dan modul sehingga para peserta (unit kerja) dapat lebih jelas lagi menerima informasi yang disampaikan. Dengan bantuan media (*infocus* dan modul) mampu memberikan rasa senang dan penilaian tersendiri terhadap Komunikator yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil korelasi antara Media Yang Digunakan Dalam Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Pemahaman Unit Kerja yaitu adanya hubungan yang cukup berarti. Karena salah satu unsur dari keefektifan komunikasi adalah media.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti melihat media yang digunakan pada kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika Pemerintah Kota Bandung sangat berpengaruh positif, karena memakai *Infocus* sebagai media utama dari kegiatan tersebut sehingga seluruh peserta (unit kerja) dapat membaca materi yang sedang disampaikan oleh komunikator. Selain itu juga ditambah dengan disebarkan modul kepada masing-masing peserta (Unit Kerja) sehingga para peserta (unit kerja) dapat lebih jelas lagi menerima informasi yang disampaikan.

Dengan begitu maka dapat menunjang kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi seperti yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Hubungan Masyarakat. Maka dengan alat pendukung seperti media (*infocus* dan modul) dapat menunjang dari kegiatan pelatihan sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung adanya sebuah pemahaman dari unit kerja (peserta) yang hadir.

2. Pada pembahasan ini peneliti akan membahas mengenai Pemahaman, Salah satu dampak dari efektivitas komunikasi adalah perubahan sikap apakah paham atau tidak. Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 1995 : 5).

Baron, Byrne, dan Myers menyatakan bahwa sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu :

1. Aspek kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.
2. Aspek afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
3. Aspek konatif (komponen perilaku, atau *action component*), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. (Gerungan, 1996)

Untuk itu Aspek Kognitif, Aspek Afektif dan Aspek Konatif dijadikan sebagai indikator dari pengertian Pemahaman yang peneliti angkat. Agar lebih jelas lagi maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai Aspek Kognitif Unit Kerja, Aspek Kognitif ini merupakan indikator dari variabel Y yaitu Pemahaman dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aspek Kognitif Unit Kerja atau peserta dari kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Adapun pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden adalah mengenai Pengetahuan, Kemampuan, dan Pemahaman.

Aspek Kognitif merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.

Berdasarkan hasil korelasi antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Kognitif Unit Kerja adanya hubungan yang cukup berarti**.** Sehingga Aspek Kognitif dengan alat ukur yang peneliti angkat dari masing-masing pernyataan seperti Pengetahuan, Kemampuan, dan Pemahaman adanya hubungan yang cukup berarti, tandanya ada pengaruh antara Efektivitas dengan Aspek Kognitif dan berada pada tingkat yang sedang.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti melihat bahwa Isi pesan dari kegiatan sosialisasi berupa pelatihan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung yang dijelaskan kepada unit kerja atau komunikan diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk dapat dipahami sehingga tidak adanya unit

kerja yang belum mengetahui mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Selain itu juga adanya kemampuan untuk mengatasi masalah pengaduan publik yang selalu dihadapi oleh Dinas-Dinas atau badan publik lainnya yang menangani hubungan langsung dengan aduan masyarakat.

b. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai Aspek Afektif Unit Kerja, Aspek Afektif ini merupakan indikator dari variabel Y yaitu Pemahaman dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aspek Afektif Unit Kerja atau peserta dari kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Adapun pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden adalah mengenai rasa senang dan penilaian.

   Aspek afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

   Berdasarkan hasil korelasi antara Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Afektif Unit Kerja adanya hubungan yang cukup berarti**.** Sehingga Aspek

Afektif dengan alat ukur yang peneliti angkat dari masing-masing pernyataan seperti rasa senang dan penilaian, adanya hubungan yang cukup berarti tandanya ada pengaruh antara Efektivitas dengan Aspek Afektif dan berada pada tingkat yang sedang.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti melihat bahwa Media yang digunakan mampu memberikan rasa senang dan penilaian tersendiri terhadap Komunikator yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dan isi pesan yang disampaikannya pun dapat diterima oleh peserta. Adanya pelatihan sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung unit kerja perwakilan masing-masing dinas atau komunikan yang hadir dapat dilihat akan kecenderungan perilakunya untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Dan juga dapat melihat kecenderungan yang ditimbulkan oleh unit kerja atau komunikan.

c. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai Aspek Konatif Unit Kerja, Aspek Konatif ini merupakan indikator dari variabel Y yaitu Pemahaman dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aspek Konatif Unit Kerja atau peserta dari kegiatan Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Adapun pernyataan-pernyataan yang

diajukan kepada responden adalah mengenai kecenderungan perilaku dan kesediaan.

Aspek konatif merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Berdasarkan hasil korelasi antara Efektivitas pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dengan Aspek Konatif Unit Kerja adanya hubungan yang cukup berarti**.** Sehingga Aspek Konatif dengan alat ukur yang peneliti angkat dari masing-masing pernyataan seperti kecenderungan perilaku dan kesediaan, adanya hubungan yang cukup berarti tandanya ada pengaruh antara Efektivitas dengan Aspek Afektif dan berada pada tingkat yang sedang.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti melihat bahwa keberhasilan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Komunikatornya melalui pesan yang disampaikan menggunakan *infocus* kepada penerima diharapkan adanya suatu sikap paham dari isi kegiatan sosialisasi tersebut. Dan peserta pelatihan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat ke dalam kegiatan yang sesungguhnya dalam

menghadapi publik. Sehingga dengan begitu kegiatan pelatihan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif karena sesuai dengan tujuan.

Dari hasil data diatas terlihat bahwa pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adanya pengaruh dengan pemahaman Unit Kerja atau pesertanya dari masing-masing dinas yang berada di kota bandung. Agar tujuan tercapai dari informasi yang disampaikan, maka Komunikator atau sumber harus bisa melakukan komunikasi yang efektif sehingga pesan yang disampaikannya dapat di pahami bagi penerima informasi.

Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta dapat mengubah sikap komunikan. Artinya kredibilitas komunikator, mendukung pada keefektivitasan komunikasi.

Salah satu dampak dari efektivitas komunikasi tersebut di atas adalah perubahan sikap yang nantinya menimbulkan sebuah pemahaman dari tiap-tiap unit kerja atau badan publik yang menjadi peserta yang hadir dalam pelatihan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait

dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi publik yang dikecualikan, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan undang-undang ini.

Berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tentunya memerlukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap substansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diharapkan seluruh badan publik dapat memahami dan melaksanakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena masyarakat akan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Suatu organisasi apapun bentuknya dan bidang kegiatannya akan melibatkan komunikasi dalam penyebaran informasi. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi sebab telah banyak bukti yang menunjukan pentingnya komunikasi dalam menunjang keberhasilan.

Sesuai dengan tujuan pelatihan menurut Edwin B Flippo (1995:76) Adanya pelatihan untuk unit kerja (perwakilan masing-masing Dinas yang berada di Kota Bandung) merupakan suatu usaha peningkatan *knowledge* dan *skill* unit kerja untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung agar dapat menghasilkan unit

kerja yang dapat memenuhi penyelesaian masalah-masalah yang ada khususnya mengenai pengaduan publik.

Jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam *In House Training* (IHT). Tujuan pelatihan berupa sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP). Dengan adanya kegiatan tersebut akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku.(Andrew F. Sikula : 1981:236). Maka adanya sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik sesuai dengan tujuan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan unit kerja (peserta), menambah pengetahuan peserta (unti kerja), meningkatkan keterampilan peserta (unit kerja), dan perubahan sikap perserta (unti kerja) kearah yang lebih positif.

Adapun manfaat dari program pelatihan menurut Henry Simamora (1995:84) adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas
2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima,
3. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan,
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan perencanaan sumber daya manusia,
5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, dan

6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka.

Dalam program pelatihan peserta merupakan salah satu unsur yang penting karena program pelatihan merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada unit kerja (peserta) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dalam rangka untuk meningkatkan kapabilitas unit kerja (perwakilan masing-masing Dinas yang berada di Kota Bandung) berupa pembekalan pengetahuan dan keterampilan baik teknik maupun non teknik. Yang dimaksud dengan unit kerja ialah badan publik, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatkan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah.

Maka dari itu dengan diadakannya kegiatan pelatihan dalam sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung adanya sebuah pemahaman dari tiap unit kerja atau badan publik yang menjadi pesertanya. Dengan melakukan pelatihan tersebut dalam kegiatan sosialisasi diperlukan adanya komunikasi yang efektif agar terjadinya kesamaan pesan yang disampaikan.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 13 yang menunjukkan bahwa besarnya koefisien Korelasi *Rank Spearman* antara efektivitas sosialisasi Undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja adanya hubungan yang tinggi, kuat**.** Sehingga adanya hubungan yang tinggi,kuat tandanya ada pengaruh yang sangat positif antara Efektivitas dengan Pemahaman dan berada pada tingkat yang tinggi setiap pernyataannya.

Dari hasil analisis diatas maka dapat dilihat bahwa Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah Kota Bandung efektif terhadap pemahaman unit kerja (pesertanya) melalui beberapa kriteria. Sehingga hasil dari adanya sosialisasi tersebut nantinya dapat diaplikasikan oleh para peserta.